

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data hasil penelitian tentang Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu berdiri tahun 2010 yang merupakan perpindahan kegiatan belajar santri tsanawiyah di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Gardu Sawah. Program pesantren disusun langsung oleh pendiri Pesantren Al-Istighotsah yaitu KH. Mahfudz Syafi'i, ulama tasawuf yang '*alim* dari Jombang Jawa Timur. Keluasan ilmu, akhlakul karimah dan kedudukan KH. Mahfudz Syafi'i sebagai pembimbing thoriqoh Syadziliyah di kabupaten Bekasi menjadi magnet bagi para jamaah dari berbagai lapisan elemen masyarakat dan daerah mana saja. Karena kecintaan itu pula maka para jamaah mengamanahkan putra-putri mereka untuk *nyantri* di pesantren Al-Istighotsah yang berjenis pesantren salafiyah dan tidak mendapatkan ijazah sekolah terbitan pemerintah sebagaimana pesantren modern, sekolah atau madrasah pada umumnya.
2. Realitas wajib belajar dua belas tahun sebelum dan sesudah diimplementasikan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu menunjukkan bahwa sebelum diimplementasikan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) tingkat kesadaran pengurus pesantren dan wali santri terhadap pendidikan sudah tergolong tinggi, namun dengan adanya legalitas Pondok Pesantren yang menyelenggarakan PK PPS dibawah Kementerian agama secara resmi dan mandiri semakin menumbuhkan kepercayaan diri bagi pengurus pesantren dalam memaksimalkan program Pendidikan yang salah satunya bisa menyelenggarakan Ujian Nasional secara mandiri. Di sisi lain legalitas tersebut juga memberikan kepercayaan dan motivasi lebih terhadap santri dan wali untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Istighotsah. Meskipun demikian harus diakui dalam hal ini juga ternyata memberikan dorongan tersendiri bagi santri kelas akhir Wustho atau wali santri untuk menggunakan ijazah kesetaraan yang mereka dapatkan setelah dinyatakan lulus dengan tidak melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu melainkan bermutasi ke sekolah atau madrasah luar pesantren.

pesantren

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu serta solusinya:
 - a. Faktor pendukung implementasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah

Setu harus ditunjang dengan komitmen dari keturunan KH. Mahfudz Syafi'i baik putra-putrinya, menantu atau cucu dan seterusnya demi mengawal warisan pemikiran, sanad keilmuan dan cita-cita pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Istighotsah. Komitmen itu diwujudkan dengan menggunakan jalur Pendidikan nonformal di bidang Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Diantara faktor pendukung yaitu pemahaman dan komitmen Pengasuh pesantren dan dukungan dari semua warga pesantren (keluarga besar pengasuh dan dewan asatidz) terhadap program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu. Hal yang paling mendasari dukungan tersebut adalah sejumlah aturan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah dinilai pengasuh pesantren sesuai dengan keinginan dan komitmen keluarga KH. Mahfudz Syafi'i di Setu karena bisa terus melanjutkan sistem dan budaya pesantren yang sebelumnya dirancang oleh pendiri terdahulu bahkan mengembangkannya. Selain itu ketokohan pendiri pesantren juga yang demikian kharismatik sampai saat ini masih berkesan di hati para jamaah, santri, alumni dan wali santri serta masyarakat sekitar, tak terkecuali sejumlah petugas di pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat. Kesemuanya itu bisa menjadi

dukungan moril dan materiil termasuk koordinasi dan regulasi terhadap keberadaan dan perkembangan pesantren Al-Istighotsah.

- b. Faktor penghambat implementasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu diantaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memenuhi standar operasional. Selain itu struktur birokrasi baik struktur keorganisasian maupun tugas pokok dan fungsi kepengurusan yang dibangun oleh implementor kebijakan dalam hal ini Pimpinan pesantren dengan Kepala PK PPS di pesantren Al-Istighotsah belum sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana yang telah dirumuskan Kementerian Agama.
- c. Solusi penghambat implementasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu diantaranya pesantren berusaha agar optimalisasi pengelolaan anggaran yang lebih memprioritaskan kebutuhan utama program Pendidikan Kesetaraan. Pesantren bisa mengadakan kerjasama dengan program CSR dari jaringan para guru, jama'ah atau pertemanan lintas Kepala PK PPS di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Pesantren juga hendaknya menyatukan pemahaman terkait struktur birokrasi dengan mensosialisasikan struktur organisasi dan tupoksi kepengurusan agar keorganisasian tidak hanya berpusat pada Pimpinan Pesantren dan Kepala PK PPS semata.

B. Saran

Hasil penelitian dan analisis temuan di lapangan, maka berikut dikemukakan beberapa rekomendasi untuk kepentingan Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu di masa yang akan datang yaitu:

1. Pengasuh pesantren, Kepala PK PPS Al-Istighotsah Setu

Upaya untuk mengefektifkan implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu, maka dukungan dan komitmen serta kontribusi dari berbagai warga madrasah khususnya Pengasuh pesantren, Kepala PK PPS dan para guru sangat diharapkan demi tercapainya pemanfaatan legalitas kelembagaan pesantren. Dengan upaya seperti itu, ketertarikan masyarakat baik santri dan wali santri terhadap Pondok Pesantren penyelenggara program PK PPS bisa terus melanjutkan dan menuntaskan setiap jenjang PK PPS baik di tingkat Wustho dan Ulya. Keterbatasan sarana dan prasarana bisa dengan membuat proposal pengadaan barang kepada instansi pemerintah, organisasi masyarakat, perusahaan atau donatur yang tidak bersifat mengikat. Terkait penyelenggaraan pelatihan pengembangan SDM bagi pendidik dan tenaga kependidikan bisa disiasati dengan mendelegasikan sejumlah guru secara bergantian untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama

atau organisasi masyarakat dan lain-lain. Adapun pengadaan kursus keterampilan atau ekstrakurikuler bagi para santri bisa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah anggota komintas, relawan atau organisasi masyarakat yang memiliki program pelatihan bekerjasama dengan kelompok atau lembaga Pendidikan, yang tentunya pelatihan tersebut memang dibutuhkan dan tidak melanggar nilai-nilai budaya Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu sendiri.

2. Pemerintah/Kementerian Agama

Hasil penelitian tentang implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu masih ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dapat dijadikan informasi berharga bagi pihak pemerintah/tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) baik Kabupaten/Kota, Provinsi atau pusat/Kementrian Agama untuk mengambil kebijakan misalnya seperti penambahan anggaran sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pesantren, pelatihan pengembangan mutu kepemimpinan atau keguruan bagi kepala PK PPS dan pendidik atau TKG serta sejumlah workshop kewirausahaan bagi santri dari tiap-tiap pesantren.

3. Peneliti Selanjutnya

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menemukan berbagai permasalahan yang ada di lapangan tentang implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) baik di tingkat satuan lembaga, regional, daerah maupun pusat yang diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan terkait berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini hanya sebagian kecil dalam mengungkap data yang berhubungan dengan implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS). Oleh karena itu, direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian evaluatif pada bidang kajian lain atau pada subjek dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Temuan ini memberi peluang kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji problematika implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) yang lebih kaya terutama penelitian lanjutan tentang implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) dengan melihat perbandingan pondok pesantren salafiyah yang berlokasi di perkotaan, pinggiran, dan pedesaan.